

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berperan penting guna penentuan efektivitas pelaksanaan sejumlah program maupun aktivitas yang direncanakan pemerintahan daerah, dan menjadi perangkat utama dalam pengaturan keuangan wilayah. Selain berfungsi sebagai sarana perencanaan keuangan, anggaran juga berperan sebagai instrumen untuk pengendalian, evaluasi, serta pertanggung jawaban dalam pengelolaan keuangan.

Pembiayaan sektor publik menjadi satu diantara aspek memiliki peran signifikan pada penyelenggaraan administrasi negara daerah. Pemerintah daerah harus mampu mengoptimalkan sumber pendapatan dan mengelola pembiayaan secara optimal guna memastikan kebutuhan belanja daerah dapat terpenuhi tanpa menimbulkan defisit yang berlebihan. Dalam konteks ini, BPKAD memiliki tanggung jawab dalam merancang kebijakan anggaran yang mendukung stabilitas fiskal dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Evaluasi terhadap kinerja anggaran SKPD memiliki peran signifikan dalam mengevaluasi tingkat keberhasilan pengelolaan anggaran yang efektif dan ekonomis sebagai upaya strategis untuk mendorong Implementasi program pengembangan wilayah.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah komponen penting mengatur keuangan daerah dimana mencerminkan kapasitas anggaran serta prioritas pembangunan daerah. Penyusunan APBD melibatkan berbagai tahapan dari perumusan rencana, penetapan anggaran, hingga pelaksanaan program hingga evaluasi. Proses ini, BPKAD berperan dalam mengoordinasikan serta memastikan bahwa alokasi anggaran dilakukan secara tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan Daerah beserta pedoman pengelolaan keuangan yang transparan dan bertanggung jawab.

SKPD pada BPAKD ialah perkiraan total penerimaan yang diharapkan dapat diterima oleh pemerintah daerah melalui anggaran satu tahun. Pada tahun 2020, realisasi anggaran pendapatan daerah tercatat sebesar

Rp1.617.658414.714 dan realisasi nya sebesar Rp.1.621.827.275.396 dengan hasil persentase 100,26%. Namun, pada tahun 2021, terjadi penurunan realisasi anggaran pendapatan mencapai Rp1.658.405.928.034 dan realisasi nya sebesar Rp.1.652.948.449.754 dengan hasil presentase 99,67%. pada tahun 2022, realisasi anggaran pendapatan daerah mengalami peningkatan sebesar Rp 1.670.844.905.471 dan realisasi nya sebesar Rp.1.668.797.755.118 dengan hasil persentase 99,88%. Namun pada tahun 2023 kembali terjadi nya penurunan pada realisasi anggaran pendapatan sebesar Rp. 1.755.751.906.289 dan realisasinya sebesar Rp. 1.662.743.583.686 dengan hasil persentase sebesar 94,70%. Pada tahun 2024 realisasi anggaran pendapatan mengalami kembali terjadinya penurunan yaitu sebesar Rp. 1.886.534.704.938 dan realisasinya sebesar Rp.1.765.182.353.921 Dengan persentase 93,57%.

Anggaran belanja daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam BPKAD yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Dalam beberapa tahun terakhir, realisasi anggaran belanja daerah menunjukkan perkembangan yang signifikan, pada tahun 2020, anggaran belanja daerah ditetapkan sebesar Rp 1.826.930.849.781, dengan realisasi mencapai Rp 1.665.932.584.837. Persentase realisasi pada tahun ini tercatat sebesar 91,19%, menunjukkan bahwa hampir seluruh anggaran dapat terealisasi dengan baik. Memasuki tahun 2021, anggaran belanja daerah meningkat menjadi Rp 1.961.694.919.058. Namun, realisasi anggaran mengalami penurunan menjadi Rp 1.740.357.878.019, dengan persentase realisasi sebesar 88,72%. Penurunan ini mengindikasikan tantangan dalam pelaksanaan program-program yang telah direncanakan. Tahun 2022 menunjukkan anggaran yang sedikit menurun menjadi Rp 1.812.832.658.629, dengan realisasi sebesar Rp 1.622.747.432.178 dan persentase realisasi mencapai 89,51%. Meskipun ada penurunan dalam angka nominal, persentase realisasi tetap menunjukkan kinerja yang cukup baik dalam konteks pengelolaan anggaran. Saat tahun 2023, anggaran belanja daerah kembali mengalami peningkatan jadi Rp 1.863.794.648.856 dengan realisasi mencapai Rp 1.720.255.456.671 dan persentase realisasi sebesar 92,30%. Ini

menunjukkan perbaikan dalam pengelolaan dan pelaksanaan anggaran dibandingkan tahun sebelumnya. Terakhir, pada tahun 2024, anggaran ditetapkan sebesar Rp 1.928.586.899.927, dengan realisasi sebesar Rp 1.800.252.368.262 dan persentase realisasi mencapai 93,35%. Peningkatan persentase ini mencerminkan upaya yang lebih baik pada pengelolaan maupun penggunaan anggaran belanja daerah.

Pada tahun 2020, realisasi anggaran pembiayaan menunjukkan kinerja yang sangat baik. Dari total anggaran sebesar Rp211.176.919.411, realisasi mencapai Rp211.177.186.101 atau setara dengan 100%, menandakan pengelolaan anggaran yang optimal sesuai target. Kemudian, saat tahun 2021, realisasi anggaran belanja menurun terkait efektivitasnya. Melalui total anggaran sebesar Rp303.288.991.024, hanya terealisasi sebesar Rp247.088.085.423 atau 81,47%, menunjukkan adanya deviasi yang cukup signifikan dari perencanaan. Pada tahun 2022, realisasi anggaran kembali menunjukkan perbaikan. Dari anggaran sebesar Rp142.087.753.158, realisasi yang dicapai sebesar Rp142.092.419.627 atau 100%, mencerminkan akurasi dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Peningkatan juga terjadi di tahun 2023, dengan realisasi belanja yang melebihi target. Dari anggaran sebesar Rp108.042.742.567, realisasi mencapai Rp109.564.067.973, menghasilkan persentase 101,41%. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dan penyesuaian yang efektif dalam pelaksanaan anggaran. Pada tahun 2024, kinerja anggaran belanja mengalami lonjakan signifikan. Dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp42.052.194.989, realisasi belanja mencapai Rp47.525.060.138 atau 113,01%. Kelebihan ini mencerminkan kebutuhan aktual yang lebih besar dari perencanaan awal, yang direspons dengan penyesuaian anggaran secara adaptif

Dalam penyusunan APBD, anggaran sektor publik menjadi fokus utama dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan infrastruktur. Efektivitas pengelolaan anggaran sektor publik sangat bergantung pada sejauh mana pemerintah daerah mampu mengelola pendapatan dan belanja dengan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan

akuntabilitas. Maka dari itu, pengkajian terhadap efisiensi dan efektivitas anggaran SKPD, khususnya BPKAD Kota Jambi, sangat utama dalam penilaian sejauh mana implementasi kebijakan fiskal yang telah diterapkan mampu memberikan dampak positif terhadap pembangunan daerah.

Anggaran SKPD merupakan bagian dari APBD yang secara langsung berkaitan dengan Penerapan tanggung jawab dan peran setiap perangkat daerah. Setiap SKPD, termasuk BPKAD Kota Jambi, bertanggung jawab untuk mengelola anggarannya dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan dana. Evaluasi terhadap kinerja anggaran SKPD dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana sumber daya keuangan digunakan serta sejauh mana anggaran yang telah dialokasikan mampu menggapai target yang telah ditentukan dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

Dalam praktiknya, penataan anggaran SKPD dihadapkan pada beragam kendala, salah satunya adalah terbatasnya sumber daya, ketidaksesuaian antara perencanaan realisasi anggaran, serta adanya risiko inefisiensi dalam penggunaan dana. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme peninjauan dan penilaian secara ketat dilaksanakan guna menjamin bahwa anggaran yang telah disediakan digunakan secara optimal dalam mendukung rencana program dan kegiatan.

Selain itu, dalam konteks hak pengelolaan sendiri oleh daerah diberikan otoritas tinggi untuk mengatur anggaran serta memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Situasi ini memberikan peluang bagi BPKAD Kota Jambi untuk lebih fleksibel dalam merancang kebijakan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan wilayah. Akan tetapi, otonomi menuntut tanggung jawab yang lebih besar dalam memastikan bahwa anggaran dikelola secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

Evaluasi kinerja anggaran juga berperan dalam memberikan rekomendasi kebijakan untuk perbaikan di masa mendatang. Dengan melakukan analisis mendalam terhadap aspek-aspek yang berdampak terhadap efektivitas pelaksanaan anggaran oleh pemerintah daerah dapat mengidentifikasi

kelemahan dan peluang perbaikan dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Dengan ini penting untuk meningkatkan mutu pelayanan masyarakat guna memastikan bahwa pembangunan daerah dapat berjalan secara berkelanjutan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, analisis terhadap kinerja anggaran SKPD, khususnya di BPKAD Kota Jambi, menjadi suatu kebutuhan yang mendesak dalam upaya meningkatkan efektivitas serta pengelolaan keuangan daerah yang hemat dan optimal. Dengan memahami pola pengelolaan anggaran serta faktor-faktor yang mempengaruhi kinerjanya, pemerintah daerah diharapkan mampu menyusun langkah-langkah strategis guna memperbaiki kebijakan anggaran dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan demi tercapainya pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis memiliki ketertarikan pada penelitian dengan judul **Analisis Kinerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jambi.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Perkembangan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja SKPD Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Selama Periode Tahun 2020-2024?
2. Bagaimana Kinerja Anggaran yang dilihat dari Rasio Efektifitas, Rasio Serapan Anggaran Belanja, dan Rasio Efisiensi, pada anggaran SKPD pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Selama Periode 2020-2024?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perkembangan realisasi anggaran pendapatan dan belanja dari SKPD Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi selama periode 2020-2024
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja anggaran yang dilihat dari Rasio Efektifitas, Rasio Serapan Anggaran Belanja, dan Rasio Efisiensi,

pada anggaran SKPD pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi selama periode 2020-2024

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penemuan riset mampu menghadirkan berbagai manfaat kepada seluruh pihak, khususnya:

##### **1) Manfaat Akademis**

Penelitian ini memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dalam bidang keuangan daerah, khususnya mengenai analisis kinerja anggaran SKPD berdasarkan rasio efektivitas, efisiensi, dan serapan anggaran belanja. Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dan referensi bagi akademisi dan mahasiswa dalam pengembangan teori dan pembelajaran tentang pengelolaan keuangan sektor publik, serta memperluas literatur empiris mengenai evaluasi anggaran pada instansi pemerintah daerah. Penelitian ini juga dapat mendorong penelitian lanjutan yang lebih mendalam terkait pengaruh kebijakan fiskal terhadap pencapaian pembangunan daerah.

##### **2) Manfaat Praktis**

hasil penelitian ini dapat digunakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jambi sebagai bahan evaluasi dalam menyusun strategi peningkatan efektivitas, efisiensi, dan optimalisasi penyerapan anggaran di tahun-tahun mendatang. Pemerintah daerah juga dapat menjadikan temuan ini sebagai dasar pertimbangan dalam merumuskan kebijakan anggaran yang lebih tepat sasaran, adaptif, dan akuntabel. Selain itu, penelitian ini bermanfaat bagi instansi lain dalam mengevaluasi kinerja anggaran SKPD guna mendorong transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.